

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alim, Muhammad, 2001, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta.
- Ashafa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta.
- _____, 2006, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Azahry, Muhammad Tahir, 1991, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Chaidir, Ellydar, 2007, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Dahrendorf, Ralf, 1986, *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri*, Rajawali, Jakarta.
- El-Muhtaj, Majda, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta.
- Gautama, Sudargo, 1973, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Penerbit Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hartono Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Nasional*, Alumni, Bandung.

Huda, Ni'matul, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta.

Husein, H.M. Wahyudin dan H. Hufron, 2008, *Hukum, Politik, dan Kepentingan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Kumsuma, A.B., 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Latif, Abdul dan H. Hasbi, 2013, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lubis, Todung Mulya, 1993, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mahfud, Mohammad, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja Grafindo, Jakarta.

_____, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2003, *Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Marzuki, Suparman, 2011, *Tragedi Politik Hukum HAM*, Pustaka Alumni, Yogyakarta.

- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 2007, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- Setiardja, A. Gunawan, 1993, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sihombing, Herman, 1996, *Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soehino, 2004, *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soemantri, Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Utrecht, Ernst, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ikhtisar, Jakarta.
- Wahjono, Padmo, 1977, *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellinek*, Melati Study Group, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan/Dokumen Lain

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.
- Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.
- Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084).

Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum.

Staatsblad 1939 Nomor 570 juncto 717 tentang Perkumpulan Indonesia.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Konvenan Internasional

Universal Declaration of Human Rights, diproklamirkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 217A pada 10 Desember 1948.

International Covenant on Civil and Political Rights, diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2200A (XXI) pada 19 Desember 1966, mulai berlaku pada 23 Maret 1976, telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Karya Ilmiah

Al Faruq, Assad, 2018, “Perbandingan Mekanisme Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017”, *Penulisan Hukum*, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Ariyanto, Bambang, 2015, “Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan”, *Jurnal Perspektif Hukum Universitas Hang Tuah*, Vol. 15.

Chakim, M. Luthfi, “Contrarius Actus”, *Majalah Konstitusi* Nomor 126, Penerbit Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Wijaya, Manunggal. K., 2012, “Pembubaran Ormas Anarkis: Sebuah Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia, *Makalah*, Seminar Ilmiah Mahasiswa Indonesia Se-Eropa, Wageningen Universiteit, Belanda.

Winata, Muhammad Reza, 2018, “Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah”, *Jurnal De Jure*, Vol. 18 Nomor 4.

Yuliani, Andi, 2018, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dari Masa Ke Masa”, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/3000-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-dari-masa-ke-masa.html>, diakses pada 17 September 2019.

Sumber Internet

Fakhri, Fakhrizal, “Ini Alasan Pemerintah Menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Soal Ormas”, <https://news.okezone.com/read/2017/07/12/337/1734467/ini-alasan-pemerintah-menerbitkan-perppu-nomor-2-tahun-2017-soal-ormas>, diakses pada 14 November 2018.

Hidayat, Rofiq, “Menguji Ketepatan Asas Contrarius Actus dalam Perppu Ormas”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt596885bec2902/menguji-ketepatan-asas-contrarius-actus-dalam-perppu-ormas/>, diakses pada 20 Agustus 2019.

Koalisi Kebebasan Pers dan Kebebasan Berekspresi, “Kebebasan Berkumpul, Berekspresi, Berpendapat, dan Hak Informasi Masih dalam Ancaman”, <http://icjr.or.id/kebebasan-berkumpul-berekspresi-berpendapat-dan-hak-informasi-masih-dalam-ancaman/>, diakses pada 3 Januari 2019,